

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Sinjai ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.

Susunan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas dibantu oleh:

2. Sekretaris, yang membawahi 3 sub bagian, meliputi :

- a. Sub Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Program

3. Bidang Kesetaraan dan Data gender;

- 1. Seksi Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- 2. Seksi Kesetaraan Gender dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
- 3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- 1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- 2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- 3. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

- 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;

2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 1. Seksi Pemenuhan Kebutuhan ber-KB;
 2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber-KB;
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Jabatan Fungsional.

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai tanggal 29 November 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, maka kedudukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan Fungsi Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Seksi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai bertugas memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Sinjai, dan dalam menyelenggarakan tugasnya itu fungsi Sekretariat, meliputi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

Dalam kegiatan sehari-hari Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai dibantu oleh 3 (tiga) orang Kasubag yaitu :

- 1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan urusan rumah tangga, protokol dan hubungan masyarakat;
 - c. melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - d. melakukan perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan dan penghapusan barang urusan rumah tangga;
 - e. menghimpun dan mengolah data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan pembangunan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi: pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai;
 - h. menyusun formasi dan perencanaan pegawai;
 - i. melaksanakan pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris..
- 1.2. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :
- a. melaksanakan analisis dan pengendalian pelaksanaan keuangan, program dan proyek;

- b. mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. melakukan penelitian kelengkapan SPP-LS yang disampaikan bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - e. melakukan verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. menyiapkan SPM sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. melakukan Verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan Akuntansi SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;
 - j. melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas;
 - k. melaksanakan penyusunan anggaran, penggunaan, pertanggungjawaban, pembukuan, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - l. memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.3. Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok :

- a. mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan penyusunan program dan anggaran rutin dan pembangunan;
- b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
- c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana program dan proyek serta penetapan rencana strategis pengembangan;
- d. menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) setiap 5 (lima) tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan bahan dan materi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) setiap tahun sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan DPPA-SKPD berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan, materi dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun laporan keuangan dan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;

- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Bidang Kesetaraan dan Data Gender

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi meliputi :

perumusan kebijakan di bidang kesetaraan dan data gender;

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan dan data gender;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan dan data gender;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesetaraan dan data gender; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

2.1. Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- c. melakukan koordinasi kelembagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- d. melakukan pembinaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;

- e. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesetaraan gender bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kesetaraan Gender Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga;
- c. melakukan kegiatan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- d. melakukan koordinasi kelembagaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- e. melakukan pembinaan kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kesetaraan gender dalam peningkatan kualitas keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Data dan Informasi Gender dan Anak;
- c. memproses penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. melakukan koordinasi forum data gender dan anak;
- e. merancang sistem layanan data dan informasi gender dan anak;
- f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan data dan informasi gender dan anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak bertugas melaksanakan koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Kebijakan secara teknis operasional menyangkut Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Di dalam melaksanakan kegiatan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 3.1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perlindungan Hak Perempuan;

- c. melakukan kegiatan di bidang pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - d. melakukan koordinasi pada lembaga pencegahan dan penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - e. melakukan pembinaan kelembagaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - f. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan bagi perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - g. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam perlindungan hak perempuan;
 - h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan data dan informasi gender dan anak; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 3.2. Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
- c. melakukan kegiatan dalam pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, pengasuhan alternatif, pendidikan, pembangunan dan kegiatan budaya, serta kegiatan dalam upaya perlindungan khusus anak;
- d. melakukan koordinasi pada lembaga pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, pengasuhan alternatif, pendidikan, pembangunan dan kegiatan budaya, serta lembaga perlindungan khusus anak;
- e. melakukan pembinaan teknis layanan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar, kesejahteraan, pengasuhan alternatif, pendidikan, pembangunan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus anak;
- f. melakukan peningkatan kapasitas sumberdaya petugas layanan perlindungan khusus anak;
- g. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- d. merancang pemenuhan sarana dan prasarana pendukung Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- e. melakukan pelayanan perlindungan perempuan dan anak berdasarkan standar nasional pelayanan mutu;
- f. melakukan pembinaan teknis bagi tenaga pengelola dan petugas layanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- g. melakukan kegiatan layanan pemberdayaan korban atau keluarga rentan untuk mendukung pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya kekerasan;
- h. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- i. melakukan kerjasama dan kemitraan pengembangan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
- j. melakukan evaluasi dan menyusun laporan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi,

fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

Di dalam melaksanakan kegiatannya, Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

4.1. Seksi Advokasi dan Pergerakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Advokasi dan Pergerakan;
- c. melakukan advokasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- d. merancang pemenuhan sarana dan prasarana informasi dan edukasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- e. melakukan kegiatan pergerakan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- f. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam melakukan advokasi dan pergerakan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan advokasi dan pergerakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. merancang pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- d. menyusun bahan monitoring dan evaluasi pendayagunaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- e. melakukan pembinaan tenaga penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- f. merancang pemenuhan fasilitasi di bidang penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penyuluhan dan pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- c. melaksanakan pengolahan analisis data kependudukan dan informasi keluarga;
- d. menganalisis dan mengkaji proyeksi perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten;

- e. melakukan analisis dampak kependudukan terhadap pembangunan Daerah;
- f. mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- g. mengelola dan merancang teknologi data dan informasi sesuai kebutuhan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pengendalian penduduk dan informasi keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan program keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam kegiatan sehari-hari Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

- 5.1. Seksi Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pemenuhan Kebutuhan ber-KB;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Kebutuhan Ber-KB;
 - c. melakukan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi;

- d. merancang pemenuhan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan ber-KB;
- e. melakukan pemenuhan alat kontrasepsi bagi peserta KB baru dan aktif;
- f. melakukan perencanaan dan pengadministrasian gudang alat dan obat kontrasepsi;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pemenuhan kebutuhan ber-KB; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam melakukan upaya pembinaan kesertaan ber-KB, yang secara rinci meliputi :

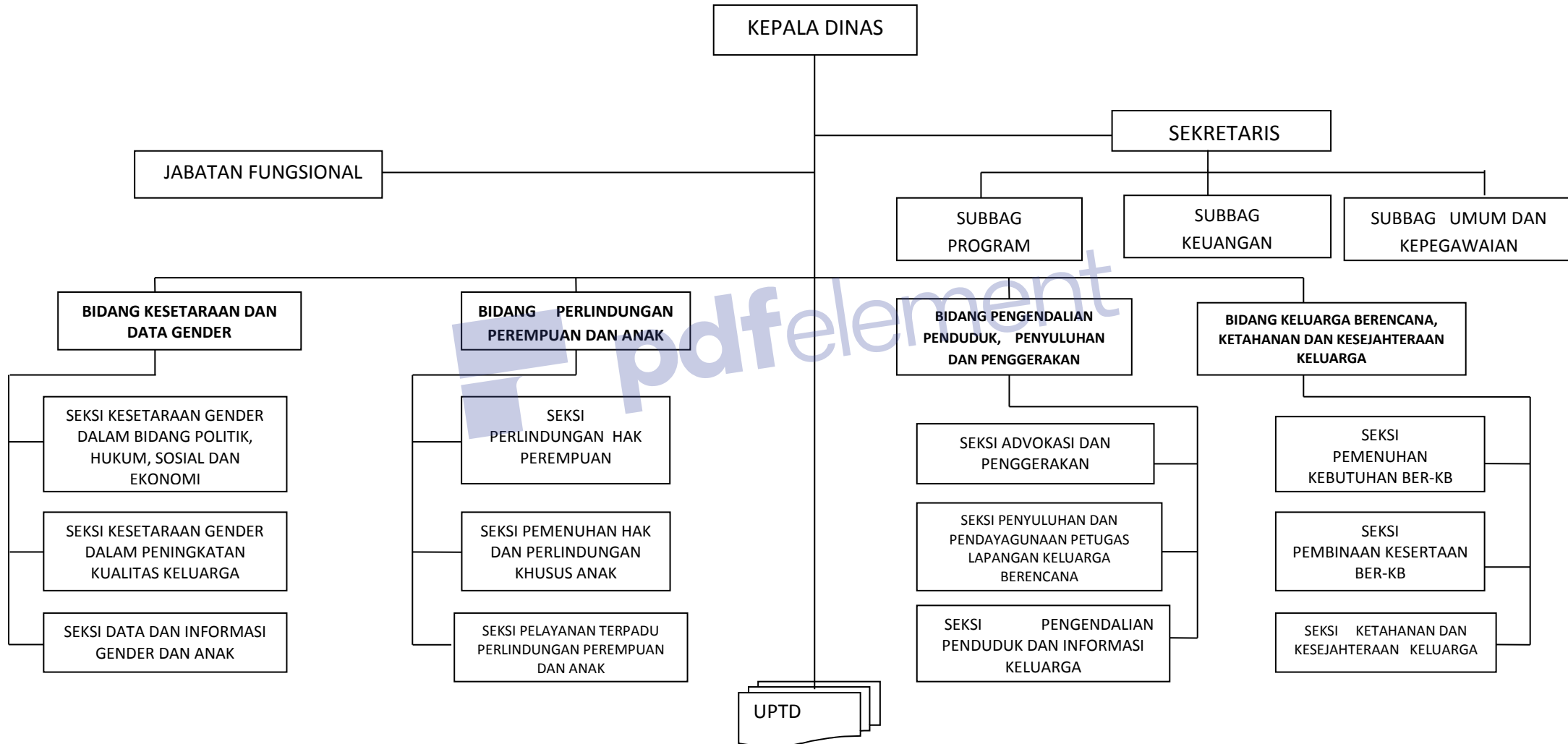
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- c. melakukan pelayanan KB bagi peserta KB baru dan peserta KB aktif;
- d. melakukan pembinaan kesertaan ber-KB;
- e. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi dan lembaga dalam pelayanan KB;
- f. melakukan koordinasi dalam penanggulangan komplikasi, efek samping dan kegagalan ber-KB;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pembinaan kesertaan ber-KB; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam melakukan ketahanan dan upaya kesejahteraan keluarga, yang secara rinci meliputi :

- a. menyusun rencana kerja Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. melakukan kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. melakukan pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi KonselingSS Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
- e. melakukan pembinaan pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- f. melakukan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait pembinaan kelompok tribina dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KAB. SINJAI





2.2.SUMBERDAYA DP3AP2KB KABUPATEN SINJAI

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Apabila dilihat dari struktur organisasi yang ada dengan standar staf minimum, maka DP3AP2KB Kabupaten Sinjai masih sangat jauh dari standar kebutuhan minimum.

Perlengkapan dan peralatan kerja yang digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas DP3AP2KB, khususnya pada bidang urusan pemberdayaan perempuan masih sangat terbatas

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan November 2018, memiliki Pegawai sebanyak 33 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari pejabat Struktural yaitu 1 orang Kepala Dinas, 4 orang Kepala Bidang, 14 orang Kepala Sub Bagian/Seksi dan sebanyak 12 orang staf pelaksanaan tugas pada DP3AP2KB didukung dengan staf sukarela sebanyak 17 orang serta tenaga Fungsional (PLKB) sebanyak 18 orang

yang merupakan pegawai pusat BKKBN, dan terdapat tenaga Penyuluh Keluarga Berencana sukarela sebanyak 73 orang.

TABEL II.1
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang KDG		Bidang PP dan PA		Bidang PEDALDUK		Bidang KB/KS	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	2									
II/b										
II/c							1			
II/d										
III/a	1			1			1	1		
III/b	1	1				1	1		1	1
III/c		2			1		1			1
III/d		1		3		1	1	1		2
IV/a		1		1		1	1		1	
IV/b										
IV/c		1								
JUMLAH	4	6		5	1	3	6	2	2	4
TOTAL	10		5		4		8		8	

TABEL II.3
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bidang KDG		Bidang PP dan PA		Bidang PEDALDUK		Bidang KB/KS	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD / MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP / MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA / MAN	2						3			
D1										
D2										
D3								1		
S1	2	2	4	1	2	2	1	2	2	
S2		4		1		1	1			2
S3										
Jumlah	4	6		5	1	3	6	2	2	4
Total	10		5		4		8		6	

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di berbagai bidang, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

2.2.2 Sarana dan prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut:

Rekapitulasi Buku Inventaris Barang per 29 Desember 2017

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

SUB-SUB UNIT : -
BIDANG : -
SUB UNIT BIDANG : -
OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SINJAI
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

Kode Lokasi:
12.22.12.1.02.05.01

Nomor Urut	Golongan	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	9
1	1	1	TANAH	1	1,589,000	
2	2	2	PERALATAN DAN MESIN	831	6,193,496,212	
		2	a. Alat-alat Besar	1	3,000,000	
		3	b. Alat-alat Angkutan	117	4,112,468,977	
		4	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur		0	
		5	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan		0	
		6	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	623	1,744,616,235	
		7	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	55	279,656,000	
		8	g. Alat-alat Kedokteran	35	53,755,000	
		9	h. Alat-alat Laboratorium		0	
		10	i. Alat-alat Keamanan		0	
3	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	15	3,059,343,082	
		11	a. Bangunan Gedung	15	3,059,343,082	
		12	b. Bangunan Monumen		0	
4	4	4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN	13	63,187,993	
		13	a. Jalan dan Jembatan		0	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	2	20,260,386	
		15	c. Instansi		0	
		16	d. Jaringan	11	42,927,607	
5	5	5	ASET TETAP LAINNYA		0	

		17	a. Buku Perpustakaan		0	
		18	b. Barang Bercorak		0	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan		0	
6	6	6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		0	
7	7	7	ASET TAK BERWUJUD (Software/Aplikasi)	1	32,500,000	
8	8	8	ASET LAIN-LAIN (Barang Inventaris Yang Rusak Berat)	87	764,443,300	
Jumlah				948	10,114,559,587	

2.3. KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai tetap melanjutkan dua bidang urusan wajib yakni urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diemban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai yakni melakukan pengarusutamaan gender diberbagai sektor melalui pelatihan analisis gender bagi perencana SKPD, meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak melalui P2TP2A, pembentukan forum anak, program Keluarga Berencana, pembinaan ketahanan keluarga melalui program three bina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, serta pembinaan ketahanan ekonomi keluarga melalui pembinaan kelompok UPPKS, pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK Remaja).

Tabel T-C 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah									0	45,71	42,38	42,38	18,33	0	45,71	42,38	42,38	18,33
2	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di DPRD Tahun 2013-2017									18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta Tahun 2013-2017									0	0	0	0	81,66	0	0	0	0	81,66
4	Rasio KDRT Tahun 2013-2017									0,09	0,06	0	0,019	0,005	0,09	0,06	0	0,019	0,005
5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Tahun 213-2017									0	0	0	0	20,46	0	0	0	0	20,46
6	Partisipasi angkatan kerja perempuan Tahun 2013-2017									0	115	97,71	0	111	0	115	97,71	0	111

7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

9	Cakupan layanan rehabilitasi social yg diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan penegakan hukum dr tingkat penyidikan sampai dgn putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukum									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban Kekerasaan									12,5	1,32	27,27	7,14	14,81	12,5	1,32	27,27	7,14	14,81

13	Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Rasio APM perempuan / laki-laki di SD									0	88,21	100,70	100,70	99,02	0	88,21	100,70	100,70	99,02
15	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP									0	60,35	97,79	97,79	87,77	0	60,35	97,79	97,79	87,77
16	Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA									0	0	125,34	125,34	99,01	0	0	125,34	125,34	99,01
17	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di Perguruan Tinggi									0	285	236	194	205	0	285	236	194	205
18	Rasio Angka Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24									0	1,22	1,23	0	0	0	1,22	1,23	0	0
19	Prosentase Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector									0	0	0	20,16	20,16	0	0	0	20,16	20,16
20	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Total Fertility Rate (TFR)											2,36					2,36		

22	Persentase Perangkat Daerah yg berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB									0	0	0	0	47,62%	0	0	0	0	47,62%
23	Persentase perangkat daerah yg menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengembalian penduduk Kabupaten Sinjai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah yg mengatur ttg pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Kabupaten Sinjai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jumlah sector yg menyepakati dan memanfaatkan data profil(parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan& pelaksanaan program pembangunan									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yg melakukan pendidikan kependudukan Kabupaten Sinjai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Rata-rata jumlah anak per keluarga Kabupaten Sinjai									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Rasio Akseptor KB									62,95	75,74	73,00	77,76	71,57	62,95	75,74	73,00	77,76	71,57
29	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 – 49									62,95	75,74	73,00	77,76	73,46	62,95	75,74	73,00	77,76	73,46
30	Angka Kelahiran remaja (Perempuan usia 15 – 19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)									-	-	2,49	2,45	0,79	-	-	2,49	2,45	0,79

31	Cakupan pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi									21,9	24,26	26	22,24	20,61	21,9	24,26	26	22,24	20,61
32	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)									11,63	11,63	14,24	19,43	17,83	11,63	11,63	14,24	19,43	17,83
33	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi									28,03	32,04	36,98	28,60	36,13	28,03	32,04	36,98	28,60	36,13
34	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB									0	0	64,35	57,6	56,19	0	0	64,35	57,6	56,19
35	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)									0	0	55,26	55,04	51,76	0	0	55,26	55,04	51,76
36	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB									0	0	46,77	52,45	47,2	0	0	46,77	52,45	47,2
37	Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan									0	0	0	0	22,22	0	0	0	0	22,22

38	Cakupan remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja /mahasiswa Kabupaten Sinjai									255,55	288,89	444,44	722,22	666,67	255,55	288,89	444,44	722,22	666,67
39	Cakupan PKB/PLKB yg di dayagunakan perangkat Daerah KBuntuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerahdi bidang pengendalian penduduk									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yg ber –KB mandiri									24,83	25,68	30,72	24,48	29,46	24,83	25,68	30,72	24,48	29,46

41	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan									100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
42	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat									138,28	158,94	214,23	218,87	195,73	138,28	158,94	214,23	218,87	195,73
43	Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yg bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dgn standarnisasi pelayanan									0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
44	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45	Persentase remaja yg terkena infeksi menular seksual (IMS)									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga									0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
47	Cakupan keluarga yg mempunyai balita dan anak yg memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak									0	0	12,22	10,21	8,63	0	0	12,22	10,21	8,63
48	Rata-rata usia kawin pertama wanita									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencanadan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Cakupan peningkatan kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak				20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100	100	100	100	100
51	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam setahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
52	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan				12 bulan	12 bulan	100 unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 unit	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
53	Pengelolaan Keuangan OPD dalam satu tahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
54	jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan dalam setahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100

55	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dalam setahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
56	Pelayanan administrasi kesekretariatan selama setahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
57	biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang digunakan dalam satu tahun				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	100	100	100	100
58	Biaya peningkatan kesejahteraan penyuluh KB dalam setahun				12 bulan					12 bulan					100				
59	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi				20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100	100	100	100	100
60	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan					1 buah	12 buah	3 buah	5 buah		1 buah	12 buah	3 buah	5 buah		100	100	100	100
61	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan				4 unit	6 unit	5 unit	5 unit	6 unit	4 unit	6 unit	5 unit	5 unit	6 unit	100	100	100	100	100
62	Jumlah Moubeler yang diadakan				2 buah	10 buah	6 buah	9 buah	10 buah	2 buah	10 buah	6 buah	9 buah	10 buah	100	100	100	100	100

63	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun				17 unit	14 unit	15 unit	19 unit	23 unit	17 unit	14 unit	15 unit	19 unit	23 unit	100	100	100	100	100
64	jumlah perlengkapan Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun					4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		4 unit	4 unit	4 unit	4 unit		100	100	100	100
65	jumlah peralatan Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun				22 unit	14 unit	12 unit	14 unit	16 unit	22 unit	14 unit	12 unit	14 unit	16 unit	100	100	100	100	100
66	Gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan dalam setahun						1 paket	1 paket	1 paket			1 paket	1 paket	1 paket			100	100	100
67	Persentase PNS yang memenuhi Standar Kedisiplinan				20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100	100	100	100	100
68	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan						1 unit					1 unit					100		

69	Jumlah pakaian dinas harian					22 pasang	26 pasang	43 pasang	45 pasang		22 pasang	26 pasang	43 pasang	45 pasang		100	100	100	100
70	Persentase SDM Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas				20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	80%	100%	100	100	100	100	100
71	Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan				6 orang	8 orang	6 orang	7 orang	8 orang	6 orang	8 orang	6 orang	7 orang	8 orang	100	100	100	100	100
72	Jumlah Penyuluh KB yang mendapatkan penilaian angka kredit				25 orang	20 orang	20 orang	21 orang	22 orang	25 orang	20 orang	20 orang	21 orang	22 orang	100	100	100	100	100
73	Opini Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja OPD				4 dok	5 dok	6 dok	6 dok	6 dok	4 dok	5 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100	100	100	100	100
74	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang disusun				1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100	100	100	100	100
75	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun				3 dok	4 dok	5 dok	6 dok	6 dok	3 dok	4 dok	5 dok	6 dok	6 dok	100	100	100	100	100

76	Jumlah pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi terlaksana								4 kali					4 kali				100
77	Jumlah pemeliharaan aplikasi sistem Informasi akuntansi yang dilaksanakan				1 kali				1 kali					100				
78	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi						100%	100%	100%			100%	100%	100%		100	100	100
79	Jumlah desa yang mewujudkan program P2WKSS						1 desa/kelurahan	9 desa/kel				1 desa/kelurahan	9 desa/kel			100	100	
80	Jumlah kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak						1 kegiatan	2 kegiatan				1 kegiatan	2 kegiatan			100	100	
81	Jumlah kecamatan yang memiliki forum anak dan berpartisipasi dalam musrembang anak untuk mendukung pencapaian						200 orang/4 jenis lomba	200 orang/4 jenis lomba	200 orang/4 jenis lomba			200 orang/4 jenis lomba	200 orang/4 jenis lomba	200 orang/4 jenis lomba		100	100	100

	kabupaten layak anak																	
82	Jumlah pengurus organisasi perempuan yang dilatih dalam bidang kepemimpinan					50 orang		50 orang			50 orang		50 orang			100		100
83	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan kabupaten layak anak						1 keg	3 keg				1 keg	3 keg				100	100
84	Jumlah pembinaan organisasi yang dilaksanakan					1 kali				1 kali					100			
85	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terfasilitasi				10 kasus	10 kasus			10 kasus	10 kasus				100	100			
86	Jumlah Standar Pelayanan Publik dan SOP perlindungan perempuan dan anak pada P2TP2A				1 dokumen				1 dokumen					100				
87	Jumlah Orang yang mendapatkan sosialisasi mengenai P2TP2A				360 org				360 org					100				

88	Jumlah kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak					1 Dokumen					1 Dokumen					100			
89	Jumlah institusi/lembaga yang telah mengimplementasikan PPRG dan PUG				50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	50 instansi	100	100	100	100	100
90	Jumlah Orang yang memahami tentang PUG untuk di aplikasikan dalam pembuatan kebijakan/program dan kegiatan					130 orang					130 orang					100			
91	Jumlah OPD yang mendapatkan penguatan Focal Point PUG					2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen			100	100	100	
92	jumlah data terpilah yang up to date setiap tahun					1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			100	100	100	
93	Jumlah kegiatan peringatan Hari Ibu yang di fasilitasi					1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100	100		

94	jumlah dokumen perencanaan yang responsive gender				1 dokumen	50 orang	-	-		1 dokumen	50 orang	-	-		100	100			
95	Jumlah Perencana OPD yang Mampu Melakukan Analisis Gender terhadap kegiatan yang di programkan				50 Orang					50 Orang					100				
96	Terkspose nya hasil karya kelompok perempuan dalam pembangunan				9 klp					9 klp					100				
97	Meningkatnya partisipasi organisasi perempuan				1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100	100			
98	jumlah Kader dan Pengurus Kelompok BKB, BKR dan BKL yang dibina						88 BKB, 77 BKL, 46 BKR	88 BKB, 77 BKL, 46 BKR	2.450 peserta baru /7.940 (3.100 BKB,1.700 BKL, 2.000 BKR)			88 BKB, 77 BKL, 46 BKR	88 BKB, 77 BKL, 46 BKR	2.450 peserta baru /7.940 (3.100 BKB,1.700 BKL, 2.000 BKR)			100	100	100
99	jumlah peserta Keluarga Berencana yang terlayani				2000 peserta		PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	2000 peserta		PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	100	100	100	100	100

100	jumlah peserta Keluarga Berencana yang terlayani				2000 peserta	2000 peserta	PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	2000 peserta	2000 peserta	PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	100	100	100	100	100
101	jumlah peserta Keluarga Berencana yang terlayani				2000 peserta	2000 peserta	PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	2000 peserta	2000 peserta	PB 500 PA 7.050	PB 500 PA 7.050	600 Peserta Baru	100	100	100	100	100
102	Jumlah distribusi alkon mendapatkan dukungan operasional DAK KB						1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan			100	100	100
103	Jumlah calon Fasilitator PIK remaja yang dilatih						40 orang	40 orang				40 orang	40 orang				100	100	
104	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari keluarga Nasional						3 kali	3 kali	3 kegiatan			3 kali	3 kali	3 kegiatan			100	100	100
105	persentase jumlah keluarga yang memiliki pemahaman tentang program KKB dan pengendalian penduduk								100%					100%					100
106	Tingkatan fasilitasi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional								2 keg					2 keg					100

107	Jumlah pelaksanaan pemutahiran data keluarga yang dilaksanakan						62.000 KK	62.000 KK	1 kali			62.000 KK	62.000 KK	1 kali			100	100	100
108	jumlah petugas penyuluh KB yang mendapatkan penguatan								74 orang					74 orang					100
109	Jumlah kampung KB yang mendapat oprasional DAK								9 kec					9 kec					100
110	Jumlah Balai Penyuluhan KB Kecamatan yang mendapatkan dukungan operasional DAK KB						9 Balai	9 Balai	9 Balai			9 Balai	9 Balai	9 Balai			100	100	100
111	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan media KIE								9 kec					9 kec					100
112	Jumlah PPKBD dan sub PPKBD yang mendapatkan biaya operasional								160 orang (2 orang perdes a/kel)					160 orang (2 orang perdes a/kel)					100

113	Jumlah pelaksanaan pendataan keluarga yang dilaksanakan				1 kali	1 kali				1 kali	1 kali				100	100		
-----	---	--	--	--	--------	--------	--	--	--	--------	--------	--	--	--	-----	-----	--	--

Tabel T.C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URAIAN	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	260,573,500	490,339,400	381,328,000	633,435,000	463,299,500	230,565,432	457,419,670	373,052,691	628,903,023	461,446,371	88.48	93.29	97.83	99.28	99.60	(8.30)	(19.12)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	17,160,000	7,200,000	6,990,000	8,280,000	6,660,000	3,433,537	3,665,270	5,090,131	5,923,499	6,398,500	20.01	50.91	72.82	71.54	96.07	(13.12)	(9.18)
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	49,500,000	69,228,500	84,350,000	86,710,000	89,490,000	41,900,000	69,228,500	84,350,000	86,710,000	89,490,000	84.65	100.00	100.00	100.00	100.00	(6.33)	(18.04)
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3,600,000	2,640,000	2,220,000	2,400,000	2,760,000	2,895,000	1,940,000	2,140,000	2,400,000	2,400,000	80.42	73.48	96.40	100.00	86.96	3.02	(19.38)

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH	110,445,000	124,253,400	170,900,000	203,684,000	236,409,500	102,840,500	109,874,800	170,897,800	201,536,301	236,147,226	93.11	88.43	100.00	98.95	99.89	4.07	(2.34)
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN KESEKRETARIA TAN	76,868,500	65,337,500	98,042,000	317,281,000	109,000,000	76,868,500	57,702,000	96,934,000	31,281,000	109,000,000	100.00	88.31	98.87	9.86	100.00	44.64	37.18
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASI ONAL	3,000,000	7,600,000	16,700,000	13,100,000	73,400,000	2,627,900	4,164,100	11,522,760	13,072,223	72,266,000	87.60	54.79	69.00	99.79	98.46	115.52	135.75
PENYEDIAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN		14,965,000					14,965,000				100.00						
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENYULUH KB		197,115,000					195,315,000				99.09						
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR			2,126,000	1,980,000	1,980,000			2,118,000	1,980,000	1,980,000			99.62	100.00	100.00	(35.62)	(35.51)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92,250,000	81,050,000	132,570,000	118,700,000	136,510,000	91,299,638	70,818,000	132,539,100	108,878,001	135,356,000	98.97	87.38	99.98	91.73	99.15	8.75	(1.59)

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR	15,000,000		6,500,000	11,600,000	17,700,000	14,950,000		6,500,000	11,600,000	17,680,000	99.67		100.00	100.00	99.89	38.50	10.29
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	35,500,000	25,500,000	35,870,000	12,000,000	8,000,000	35,330,000	25,450,000	35,870,000	12,000,000	8,000,000	99.52	99.80	100.00	100.00	100.00	70.60	(39.73)
PENGADAAN MEBELEUR	13,250,000	6,750,000	22,700,000	6,500,000	19,000,000	13,250,000	6,750,000	22,700,000	6,500,000	19,000,000	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	81.74	64.31
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	25,500,000	36,800,000	55,200,000	79,300,000	73,400,000	24,769,638	32,493,000	55,199,100	71,128,001	72,266,000	97.14	88.30	100.00	89.69	98.46	4.99	0.08
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	3,000,000	12,000,000	6,180,000	7,300,000	4,400,000	3,000,000	6,125,000	6,150,000	5,650,000	4,400,000	100.00	51.04	99.51	77.40	100.00	(25.48)	(32.46)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR			2,120,000	2,000,000	2,500,000			2,120,000	2,000,000	2,500,000			100.00	100.00	100.00	(26.89)	(26.89)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR					11,510,000					11,510,000					100.00		

Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,125,000		10,120,000	11,960,000		10,125,000		10,120,000	11,960,000		100.00		100.00	100.00		(40.91)	(40.91)
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPAN NYA	10,125,000		10,120,000	11,960,000		10,125,000		10,120,000	11,960,000		100.00		100.00	100.00		#DIV/0!	#DIV/0!
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80,027,000	152,811,000	59,366,000	63,372,000	45,143,000	48,452,800	152,811,000	51,349,000	63,372,000	45,067,000	60.55	100.00	86.50	100.00	99.83	(18.96)	(42.97)
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PENYULUH KB	10,027,000	12,061,000	15,366,000	16,050,000	16,000,000	9,912,000	12,061,000	15,321,000	16,050,000	15,924,000	98.85	100.00	99.71	100.00	99.53	(1.63)	(17.25)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	70,000,000	140,750,000				38,540,800	109,509,700				55.06	77.80				(100.00)	(100.00)
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44,000,000		44,000,000	47,322,000	29,143,000			36,028,000	47,322,000	29,143,000	0.00		81.88	100.00	100.00	(43.62)	(35.69)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	91,740,000	50,336,000	62,970,000	71,793,200	70,400,000	87,995,000	40,723,500	62,970,000	71,793,200	70,400,000	95.92	80.90	100.00	100.00	100.00	15.54	(8.33)

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	9,212,500	10,426,000	11,485,000	13,298,200	12,400,000	9,212,500	10,413,500	11,485,000	13,298,200	12,400,000	100.00	99.88	100.00	100.00	100.00	(1.63)	(20.17)
PENYUSUNAN RKA, DPA DAN DPPA SKPD	11,412,500	21,910,000	51,485,000	58,495,000	58,000,000	10,467,500	20,310,000	51,485,000	58,495,000	58,000,000	91.72	92.70	100.00	100.00	100.00	16.45	16.57
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD	21,115,000					19,315,000					91.48						
PENYEDIAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	50,000,000	18,000,000				49,000,000	10,000,000				98.00	55.56				(100.00)	(100.00)
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	142,096,500	139,886,500	204,300,000			137,543,500	131,730,000	204,080,000			96.80	94.17	99.89			(26.98)	(22.54)
PELATIHAN ANALISIS GENDER BAGI PERENCANA SKPD	72,096,500	67,096,500				68,043,500	65,352,500				94.38	97.40				(100.00)	(100.00)
PAMERAN HASIL KARYA PEREMPUAN DI BIDANG PEMBANGUNAN	-	22,790,000				-	22,790,000					100.00				(100.00)	(100.00)

PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN	70,000,000		150,000,000			69,500,000		149,780,000			99.29		99.85			(100.00)	(100.00)
FASILITASI KEGIATAN PERINGATAN HARI IBU TK.KABUPATEN SINJAI		50,000,000	54,300,000				43,587,500	54,300,000				87.18	100.00			(45.70)	(37.71)
Program Keluarga berencana	1,394,334,209	1,454,360,500	2,026,370,850	3,190,099,000	1,209,834,635	1,388,525,500	1,383,277,600	2,021,547,110	3,086,543,100	1,162,783,435	99.58	95.11	99.76	96.75	96.11	12.36	(15.88)
LOMBA MASYARAKAT PEDULI KB	20,987,000	28,610,000				20,987,000	28,610,000				100.00	100.00				(100.00)	(100.00)
HARI KELUARGA NASIONAL	45,020,000	59,515,000	52,275,000			44,520,000	59,235,000	52,274,200			98.89	99.53	100.00			(56.08)	(55.88)
PENDATAAN KELUARGA	145,645,500	80,467,000	75,337,000	71,607,000		142,940,000	80,198,100	75,034,000	71,557,000		98.14	99.67	99.60	99.93		(37.11)	(37.02)
PELAYANAN TNI MANUNGGA KB- KES	29,929,000	40,650,000	37,172,500	40,496,000	35,000,000	28,814,000	40,460,000	37,022,500	39,846,000	33,800,000	96.27	99.53	99.60	98.39	96.57	(7.71)	(29.01)
KESATUAN GERAK PKK	35,099,000	36,391,000	24,967,000	32,306,000	33,000,000	34,329,000	36,391,000	24,917,000	30,916,000	32,583,000	97.81	100.00	99.80	95.70	98.74	1.04	(25.52)

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KELUARGA BERENCANA	1,059,636,209	154,275,000				1,059,323,000	1,083,932,000				99.97	702.60				(100.00)	(100.00)
BULAN BAKTI IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)	29,194,500	20,880,500		31,436,000		28,924,500	20,880,500		31,386,000		99.08	100.00		99.84		(100.00)	(100.00)
PELATIHAN PEMBINA PIK REMAJA	28,823,000	33,571,000			31,000,000	28,688,000	33,571,000			30,850,000	99.53	100.00			99.52	(53.73)	(100.00)
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN DAN PENYULUHAN KB			1,568,664,350	2,571,454,000	1,075,634,635		1,565,664,410	2,536,021,100	1,052,165,435				99.81	98.62	97.82	(31.41)	(32.18)
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL UPTD/KOORDINATOR PKB			267,955,000				266,635,000						99.51				
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN DAN ALOKON				442,800,000				376,817,000						85.10			

PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI					35,200,000					13,385,000					38.03		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan	171,654,400	162,448,600	168,501,000			155,909,600	138,667,500	159,990,000				94.95				(48.14)	(42.31)
PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI KELOMPOK PEREMPUAN	43,166,000	45,303,800	44,281,000			43,051,000	45,284,000	42,811,000			99.73	99.96	96.68			(51.13)	(52.73)
PENGUATAN DAN PENGEMBANGA N JARINGAN PEREMPUAN DI KAB. SINJAI	22,883,000					22,338,000					97.62						
SOSIALISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN ANAK	32,435,400	38,057,300				32,412,000	33,480,000				99.93	87.97				(100.00)	(100.00)
FASILITASI P2TP2A	73,170,000	64,002,500	87,076,000			58,108,600	44,818,500	80,035,000			79.42	70.03	91.91			(31.97)	(10.71)

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK		15,085,000				15,085,000					100.00				(100.00)	(100.00)
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN JEJARING PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK			37,144,000			37,144,000					100.00					
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelindungan Anak	63,769,500	112,401,000	101,900,000	483,759,000	62,821,500	106,786,000	100,285,000	471,600,000		98.51	95.00	98.42	97.49		88.47	88.06
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK KABUPATEN SINJAI	63,769,500	58,310,000	49,303,000		62,821,500	53,035,000	47,688,000			98.51	90.95	96.72			(57.72)	(55.04)
GEBYAR KREATIFITAS ANAK		54,091,000	52,597,000			53,751,000	52,597,000				99.37	100.00			(51.38)	(51.07)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	143,132,100	33,653,000	137,553,500	128,266,000		141,957,100	33,313,000	134,683,500	127,946,000		99.18	98.99	97.91	99.75		67.33	66.43
PENYUSUNAN PROFIL GENDER DAN ANAK	43,639,500					42,564,500					97.54						
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	99,492,600					99,392,600					99.90						
RANPERBUB PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN SINJAI		33,653,000					33,313,000				98.99						
SOSIALISASI PUG PENENTU			37,172,500					36,172,500				97.31					
PENGUATAN FOCAL POINT PUG			47,521,000	36,869,000				45,651,000	36,869,000			96.06	100.00			(61.21)	(59.62)

PENYELENGGA RAAN DATA GENDER DAN ANAK			52,860,000				52,860,000					100.00				
UP DATING DATA GENDER DAN ANAK				51,821,000				51,501,000					99.38			
FASILITASI KEGIATAN PERINGATAN HARI IBU TK.KABUPATEN SINJAI				39,576,000				39,576,000					100.0 0			
Program Penguatan dan pengembangan kelembagaan perempuan		270,060,000	36,681,000			266,061,000	32,956,000				98.52	89.84			(93.21)	(93.81)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS ORGANISASI PEREMPUAN		270,060,000	36,681,000				266,061,000	32,956,000			0.00	725.34			(93.21)	(93.81)

Program Pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR			37,145,000					37,145,000				100.00				
PELATIHAN CALON FASILITATOR PIK REMAJA			37,145,000					37,145,000				100.00				
Program penyiapan tenaga pendampingan kelompok bina keluarga			42,367,000					42,352,000				99.96				
PEMBINAAN KELOMPOK BKB,BKR,DAN BKL			42,367,000					42,352,000				99.96				
Program Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera				121,936,000				121,743,000					99.84			
Program Kesetaraan Data Gender					282,000,000					268446000				95.19		

PENDAMPINGAN FOCAL POINT PUG SKPD					28,210,000					27,773,000					98.45		
UP DATING DATA GENDER DAN ANAK					30,000,000					29,533,000					98.44		
FASILITASI TEMU ORGANISASI PEREMPUAN TINGKAT KABUPATEN					37,000,000					36,290,000					98.08		
PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI PEREMPUAN					186,790,000					174,850,000					93.61		
PEMBINAAN KELOMPOK BKB,BKR,DAN BKL					34,562,000					34,562,000				100.00			
PELATIHAN CALON FASILITATOR PIK REMAJA/MAHASISWA					35,295,000					35,295,000				100.00			

FASILITASI PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)				52,079,000					51,886,000					99.63			
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan dan Anak					181,700,000					180,259,200					99.21		
FASILITASI P2TP2A				59,646,000	59,600,000				56,411,000	58,650,000				94.58	98.41	(50.04)	(48.02)
PENGUATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK				29,191,000					25,891,000					88.70			
PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK KABUPATEN SINJAI				105,457,000	87,100,000				105,423,000	87,069,200				99.97	99.96	(58.70)	(58.70)

PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PENGURUS ORGANISASI PEREMPUAN				38,475,000					38,160,000					99.18		
FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN P2WKSS				60,990,000					60,860,000					99.79		
PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN				190,000,000					184,855,000					97.29		
FASILITASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK					35,000,000					34,540,000					98.69	
Program Pengendalian Penduduk penyuluhan dan penggerakan					852,080,000					739,048,000					86.73	
PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA					51,000,000					50,984,000					99.97	

PENGUATAN LINI LAPANGAN KELUARGA BERENCANA					202,100,000					201,824,000					99.86		
TEMU KADER PENGELOLA PROGRAM KKBP					40,000,000					39,450,000					98.63		
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL BALAI PENYULUH KB					405,000,000					292,810,000					72.30		
PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL INTEGRASI PROGRAM KKBP PADA KAMPUNG KB					153,980,000					153,980,000					100.00		

Dari tabel T-C 23 diatas diketahui bahwa beberapa indikator kinerja sesuai permendagri 86 tahun 2017 belum sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan adanya indikator baru setelah sebelumnya tercantum pada indikator permendagri 54 tahun 2010. Selain itu, indikator yang menjadi urusan DP3AP2KB cukup banyak, hal ini dikarenakan DP3AP2KB melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Faktor lain dari tidak tercapainya indikator adalah indikator tersebut menjadi kewenangan organisasi perangkat lain dan data tidak Adapun indikator yang berasal dari Renstra 2013-2018 sebagian besar telah mencapai target sebesar 100%.

Sedang dari tabel T-C 24 diatas diketahui bahwa beberapa indikator kinerja sesuai permendagri 86 tahun 2017 belum sepenuhnya dapat dicapai, dikarenakan adanya indikator baru setelah sebelumnya tercantum pada indikator permendagri 54 tahun 2010. Selain itu, indikator yang menjadi urusan DP3AP2KB cukup banyak, hal ini dikarenakan DP3AP2KB melaksanakan dua urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun indikator yang berasal dari Renstra 2013-2018 sebagian besar telah mencapai target sebesar 100%.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Keterbatasan sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana yang ada serta tuntutan masyarakat dan OPD lain yang membutuhkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai, maka kedepan perlu memaksimalkan

potensi yang ada dan terus ditingkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang ada.

Secara luas tentang yang harus dihadapi dalam upaya pengembangan pelayanan DP3AP2KB Kabupaten Sinjai termasuk dalam hal-hal sebagai berikut :

Tantangan :

A. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :

1. Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang belum dilaporkan.
2. Belum optimalnya peran serta dan dukungan dari Masyarakat, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Lembaga Swasta.
3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
4. Terbatasnya Tenaga Pendampingan bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
5. Perlu adanya pelayanan pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
6. Belum optimalnya penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG.
7. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam bidang politik, pemerintahan dan swasta cukup banyak, namun belum didukung dengan kemampuan yang memadai.

B. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana :

1. Belum terpenuhinya pelayanan Unmet Need secara maksimal.
2. Masih rendahnya kesadaran PUS dalam pemasangan KB Pria khususnya MOP.

3. Masih rendahnya pemakaian kontrasepsi MKJP.
4. Masih rendahnya penguatan bagi kader bina keluarga (BKR,BKB dan BKL).
5. Masih kurangnya tingkat pengetahuan dan pelatihan bagi kader.
6. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan.
7. Belum adanya peraturan daerah yang mengatur kependudukan dan keluarga berencana

Peluang :

1. Adanya dukungan program dari Pemerintah Pusat dan Propinsi untuk pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program KKBPK di daerah.
2. Komitmen pemerintah kabupaten dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program KKBPK dengan adanya pengorganisasian dan penggerakan Program-Program yang terintegrasi.
3. Dukungan Organisasi dan Asosiasi terhadap Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Adanya regulasi yang mendukung Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Adanya kerjasama yang baik antar instansi dan pemerintah desa bagi program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk peningkatan kualitas pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

serta Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Tabel 1

Kinerja pelayanan PD melihat permendagri 86.....

Indikator aspek kesejahteraan

Indikator dokumen sdgs

Tambah indikator renstra lama baik program maupun kegiatan

IKK RPJMD bab 9

Bab 6 renstra lama... untuk ouput dan outcome

Tabel 2

Uraian anggaran per program dan kegiatan

Dasar renstra dengan realisasi pertanggungjawaban

Rata2 pertumbuhan